

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.¹ David mengungkapkan bahwa strategi merupakan rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.²

Strategi dapat diartikan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan, eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, memiliki taktik dan efisiensi dalam pendanaan untuk mencapai tujuan secara efektif.³

Strategi merupakan rencana penting dan rencana besar. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Menurut Alfred Chandler strategi merupakan penetapan arahan dan sasaran tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kenneth Andrew menjelaskan bahwa strategi adalah pola sasaran, tujuan atau maksud kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti

¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2008), 3.

² David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta : Selemba Empat, 2004), 14.

³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000), 17

menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut.

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah sebuah keputusan dan kebijakan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Keputusan dan kebijakan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.⁴Strategi adalah rencana keseluruhan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajerial dengan kelompok maupun individu memperoleh apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.⁵

Strategi merupakan unsur yang paling berpengaruh dalam mencapai tujuan perusahaan. keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang mampu dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari keadaan perusahaan, tujuan, dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka mencapai sasaran dan mengarah terhadap pengembangan rencana marketing yang terinci.⁶

Menurut Amstrong, bahwa strategi terbagi menjadi tiga macam. Pertama, strategi merupakan sebuah pernyataan maksud yang digunakan dalam rangka mendefinisikan cara untuk mencapai tujuan, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya perusahaan yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal. Kedua, strategi merupakan pandangan di mana faktor keberhasilan atau isu kritis dapat dibicarakan, serta keputusan strategis bertujuan untuk membuat dampak yang besar sekaligus jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi. Ketiga, strategi pada dasarnya merupakan penetapan tujuan (tujuan strategis) dan menyesuaikan atau mengalokasikan

⁴ Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara,1996), 19

⁵ Setyo Soedrajat, *Manajemen Pemasaran Jasa Bank*, (Jakarta:Ikral Mandiri Abadi,1994), 17

⁶ Philip Kotler. *Marketing Management*, (Jakarta: Pren Hallindo,1997), 8

sumber daya dengan peluang (strategis berbasis sumber daya) sehingga dapat mencapai kesesuaian strategis antara basis sumber daya dan tujuan strategisnya.⁷

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber menjadi kata ”berdaya” artinya mempunyai atau memiliki artidaya. *Daya* artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan *pe-* dengan mendapat sisipan *-m-* dan akhiran *-an* menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.⁸ Kata “pemberdayaan ” merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang mempunyai arti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “*em*” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.⁹ Edi Suharto mendefinisikan pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun masyarakat dalam rangka memberdayakan rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.¹⁰

Pemberdayaan yaitu bagaimana menumbuhkan jiwa kemandirian dan kreativitas untuk berkembang dengan kekuatan sendiri, tidak tergantung pada bantuan dan perintah dari atas sebagaimana yang ada pada kebijakan sentranlistik. Pemberdayaan merupakan usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar semakin mampu memenuhi

⁷ Triton, *Marketing Strategic* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), 12-15

⁸ Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), 1

⁹ Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED)

¹⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*(Bandung: Ptrevika Aditam, 2005) *Cet Ke-1*, 57

kebutuhannya dan semakin dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara sejajar dengan yang lain. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pola pendekatan yang bersifat bottom-up yang bertujuan menggerakkan potensi masyarakat. Selanjutnya yang akan dicapai lewat pemberdayaan ini adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat di daerah.¹¹

Pemberdayaan (empowerment) yaitu meningkatkan kemampuan untuk memilih dan membuka kesempatan untuk memilih yang berarti adalah peningkatan kemampuan untuk mengambil keputusan dan membuka kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, terutama yang bersangkutan dengan kehidupan mereka sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan, selain dengan mendudukkan masyarakat sebagai aktor utama juga harus didukung dengan bantuan ekonomi serta membekali dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan. Wawasan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki akan meningkatkan kreativitas yang akan membantu dalam pengambilan keputusan, melihat dan memanfaatkan peluang serta mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian hasil yang diperoleh juga akan lebih baik.¹²

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan. Dalam hal ini juga terdapat metode yang dapat digunakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Strategi dengan pendekatan dan metode yang dikembangkan adalah metode PRA (Participatory Rural Appraisal). PRA adalah sekelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagai, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa

¹¹ Reni Renoati, *Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada era Otonomi Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, (Mimbar Hukum UGM, 2003).

¹² Siti Zuliyah, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah*, *Journal of Rural and Development* Volume I No. 2 Agustus 2010.

membuat rencana dan bertindak atau dapat diaktakan “dari, dengan dan oleh” masyarakat desa. Secara lebih luas PRA meliputi analisis, perencanaan dan tindakan. Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam PRA adalah :

- 1) Pemberian fasilitas, artinya memberikan fasilitas penyelidikan, analisis, penjadjian dan pemahaman oleh masyarakat desa, sehingga mereka dapat menyajikan dan memiliki hasilnya, dan juga mempelajarinya.
- 2) Pemberian fasilitas, artinya memberikan fasilitas penyelidikan, analisis, penjadjian dan pemahaman oleh masyarakat desa, sehingga mereka dapat menyajikan dan memiliki hasilnya, dan juga mempelajarinya.
- 3) Saling berbagai informasi dan gagasan antara masyarakat desa, antar masyarakat desa dengan fasilitator, dan antar fasilitator yang berbeda serta saling berbagi wilayah kegiatan, pelatihan dan pengalaman antar organisasi yang berbeda.¹³

b. Pemberdayaan Menurut Islam

Menurut Agus Ahmad Syafi’i, pemberdayaan atau *empowerment* dapat dimaknai sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.¹⁴ Berdasarkan dengan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan *dhu’afa*, “*community empowerment*” (CE) atau pemeberdayaan masyarakat pada initinya adalah membantu klien” (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan sosial dan pribadi melalui peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.¹⁵

¹³ Chambers, Robert, *PRA Participatory Rural Appraisal Memahami Desa Secara Partisipatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996)

¹⁴ Agus Ahmad Syarfi,“I, *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), 70

¹⁵ Asep Usman Ismail, *Pengelaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu’afa*(Jakarta: Dakwah Press) *Cet Ke-1*, 9

Menurut Istiqomah dalam Jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat melakukan secara mandiri upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Baik yang menyangkut tentang keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.¹⁶

Agus Efendi menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei dalam bukunya *Pengembangan Masyarakat Islam*, yaitu terdapat tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak. *Pertama*, pemberdayaan pada matra ruhaniah. Pemberdayaan ini diperlukan karena masyarakat Islam saat ini terjadi penurunan moral yang sangat memprihatinkan. Kepribadian umat Islam terutama generasi mudanya begitu mudah terkooptasi oleh budaya negatif “Barat” yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam dan tidak dapat memilikinya. Keadaan ini diperparah dengan gagalnya pendidikan agama di hampir semua pendidikan. Oleh karena itu, umat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan disain kurikulum pendidikan yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniah Islamiyah.¹⁷

Kedua, pemberdayaan intelektual. Saat ini betapa umat Islam dapat disaksikan di Indonesia sudah terlalu jauh tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Keadaan ini semakin diperparah dengan adanya orientasi lembaga pendidikan yang ada mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi lebih banyak berorientasi pada bisnis semata, lembaga pendidikan dijadikan arena bisnis yang subur. Untuk itu diperlukan berbagai macam upaya pemberdayaan

¹⁶ Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 3, 427

¹⁷ Dian Iskandar Jaelani, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)*, Eksyar, Volume 01, Nomor 01, Maret 2014: 018-034, hlm 19

intelektual sebagai sebuah perjuangan besar dari pengembalian orientasi pendidikan pada pengembangan intelektual.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Harus diakui bahwa ketertinggalan dan kemiskinan menjadi demikian identik dengan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Untuk mengatasinya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri. Dimulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, keberpihakan pemerintahan dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

Konsep pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang dititik beratkan pada “Menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada “Penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara. Karena itu, dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan). Hal ini dikarenakan kemiskinan dalam Islam juga lebih banyak dilihat dari kacamata non-ekonomi seperti kemalasan, lemahnya daya juang, dan minimnya semangat kemandirian.

c. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).¹⁸ Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai tidak berdaya atau lemah meliputi:

- 1) Kelompok lemah khusus. Seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, dan masyarakat terasing.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Press, 1987), Cet. Ke 2, 75

- 2) Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- 3) Kelompok lemah secara personal, yaitu mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Proses pemberdayaan menurut Payne memiliki tujuan untuk membantu individu memperoleh kekuatan dalam mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang tepat. Hal ini dicapai melalui peningkatan kemampuan, rasa percaya diri dan pengurangan hambatan personal serta sosial melalui transfer daya dari lingkungan sekitar. Agus Syafi'i mengatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu mendirikan atau membangun kemampuan masyarakat untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.

Adapun juga tahapan dalam strategi pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Tahapan persiapan
Tahap ini merupakan persiapan mengenai petugas dan kesiapan lapangan.
- 2) Tahapan pengkajian
Tahap pengkajian ini yaitu pengidentifikasi terhadap kebutuhan masyarakat.
- 3) Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan
Tahap ini tidak hanya petugas yang terlibat tapi juga masyarakat diharapkan aktif dalam perencanaan program
- 4) Tahap pemformulasian rencana
Tahap ini yaitu menuangkan program yang telah dibuat dalam perencanaan alternatif program.
- 5) Tahap pelaksanaan program atau kegiatan
Dalam tahap ini merupakan yang paling krusial yaitu mengenai pelaksanaan program yang telah direncanakan. Melibatkan peran masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program.

- 6) Tahap evaluasi
Tahap ini sebagai dalam rangka pengawasan terhadap program yang melibatkan masyarakat dan petugas untuk secara langsung terjun dalam pengawasan program.
- 7) Tahap terminasi
Tahap ini merupakan tahap pemutusan atau pemberhentian program. Di mana dalam tahap dilaksanakan apabila masyarakat benar-benar sudah berdaya dan bisa mandiri.

3. Konsep Ekonomi

a. Pengertian Ekonomi

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang artinya peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari cara mengelola sumber daya secara efektif untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai tingkatan, mulai dari rumah tangga individu hingga skala global. Dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada sebuah keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara bahkan dunia.¹⁹

Banyak pengertian ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut merupakan pengertian ekonomi yang dijelaskan oleh para ahli:

- 1) Adam Smith
Ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan Negara
- 2) Abraham Maslow
Ekonomi adalah suatu bidang kajian yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan mengelola sumber daya secara cerdas serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk

¹⁹ Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010) 1

memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui penerapan prinsip, teori dan sistem ekonomi yang efektif dan efisien.

3) Paul A. Samuelson

Ekonomi adalah cara manusia untuk mempelajari sistem optimalisasi penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu pengurusan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup melalui tindakan yang melibatkan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.

Pembahasan ekonomi tentu tidak terlepas dari yang namanya unsur masyarakat. dalam hal ini desa menjadi salah satu unsur pemerintahan yang sangat memperhatikan ekonomi, terutama ekonomi warga. Desa yaitu merupakan suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.²⁰ Desa dalam umumnya juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.²¹

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di

²⁰ R.Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), 11

²¹ N.Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), 44

pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.²²

Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam mengelola asset yang ada di dalam masyarakat agar tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi. Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah desa lainnya.

b. Prinsip Ekonomi

Ibnu Khaldun telah mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang positif maupun normatif. Maksudnya mempelajari ekonomi merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kesejahteraan individu. Untuk menanggapi persoalan itulah, maka timbul kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi, yang diatur oleh suatu cara berfikir dan cara bertindak yang disebut ekonomis atau menurut prinsip ekonomi.

Adapun berikut merupakan prinsip dasar sistem ekonomi Islam sendiri secara garis besar dapat kita jelaskan antara lain sebagai berikut :

1) Kebebasan individu

Dalam sistem pemerintahan Islam, kebebasan individu merupakan hak fundamental yang esensial untuk melaksanakan kewajiban agama dan sosial, serta mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam

²² Fahrudin, Kusnadi. *Analisis Potensi Ekonomi Desa Dan Prospek Pengembangannya*.

menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

2) Hak terhadap harta

Islam mengakui hak milik individu dengan batasan etika dan hukum syariah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat

3) Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui ekonomi ekonomi antar individu, tetapi berusaha meminimalkan kesenjangan tersebut melalui prinsip keadilan dan kesetaraan.

4) Kesamaan sosial

Islam tidak memaksakan kesamaan ekonomi, namun menekankan kesamaan sosial dan kesempatan yang sama untuk semua individu dalam mengakses aktivitas ekonomi dan menikmati kekayaan negara. Selain itu sangat penting setiap individu dalam sebuah negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan kegiatan untuk meningkatkan ekonomi.

5) Jaminan sosial

Dalam negara Islam, setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, berhak mendapatkan kebutuhan pokok dan hidup yang layak, sebagai implementasi prinsip "hak untuk hidup". Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi setiap negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, tanpa kecuali muslim atau nonmuslim, dalam memenuhi kebutuhannya. Dan juga terdapat persamaan sepenuhnya diantara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.

6) Distribusi kekayaan secara meluas

Islam menghimbau pentingnya distribusi kekayaan merata kepada semua lapisan masyarakat untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu

7) Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip untuk mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari

perilaku ekonomi yang tidak etis supaya tidak terjadi dalam lingkup negara.

8) Kesejahteraan individu dan masyarakat

Sistem ekonomi Islam berfokus pada harmonisasi kesejahteraan individu dan masyarakat, menghindari konflik dan persaingan tidak sehat untuk mencapai kesejahteraan. Maka Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama²³

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan jika hidup sudah lebih berkecukupan bisa untuk membantu orang yang sedang dalam kesusahan di sekitar kita.²⁴

Menurut Syafi'i Antonio, secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk memenuhi tugas tersebut, Allah SWT menganugerahkan manusia dua karunia penting: sistem kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang mencakup prinsip-prinsip hidup dan sarana kehidupan (*wasilah al-hayah*) yang meliputi sumber daya dan kemampuan untuk mencapai kehidupan yang harmonis.²⁵

Tuhan menyediakan sumber daya alam yang tak terbatas untuk mencukupi kebutuhan semua makhluk. Kelangkaan sumber daya alam disebabkan keterbatasan pengetahuan manusia dalam memanfaatkannya secara optimal. Alam beserta isinya diciptakan Allah agar dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia.

²³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahad Press, 2010), 22

²⁴ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 29

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani 2005), cet ke-9 h.7

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha dengan sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik suatu desa dengan cara menyertakan dengan cara langsung dengan bersumber dari potensi desa yang telah terpisahkan yang digunakan dengan tujuan untuk jasa pelayanan, pengelolaan aset, serta usaha-usaha yang lain dengan tujuan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.²⁶

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman

²⁶ Sutoro Eko, dkk. 2015. *Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.*

pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Seyadi peranan BUMDes adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.²⁷

b. Dasar Hukum dan Filosofi BUMDes

1. Dasar Hukum

Pemerintah telah menetapkan regulasi pengembangan BUMDes melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes diatur didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan perundang-undangan diatas guna diketahuinya peraturan perundang-undangan dan situasi hukum mengenai materi atau substansi yang akan diatur. Kajian ini bertujuan mengharmoniskan dan mensinkronkan kebijakan perundang-undangan untuk mencegah konflik regulasi di peraturan desa.

Peraturan tentang pendirian BUMDes dimuat pada beberapa kebijakan perundang-undangan sebagai berikut²⁸:

²⁷ Seyadi. *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. (ogyakartaa: UPP STM YKPN, 2003)

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90
- c) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 sampai pasal 89
- d) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.²⁹

Pengambilan keputusan BUMDes harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekitar, meningkatkan solidaritas dan kesejahteraan, serta menghindari persaingan yang merugikan usaha lokal.

2. Filosofi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas ekonomi yang lahir dari kedaulatan desa untuk mengelola sumber daya ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan jasa, aset, dan usaha lainnya. Bumdes terlahir dari kedaulatan desa untuk mengelola sumberdaya ekonomi.

Adapun filosofi keberadaan BUMDes didalam masyarakat desa adalah sebagai berikut :

- a. BUMDes merupakan badan usaha yang berfokus pada pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan warga bukan hanya mencari keuntungan.
- b. BUMDes tidak mengambil alih usaha masyarakat, tetapi menciptakan inovasi ekonomi baru, meningkatkan nilai tambah dan mengoptimalkan

²⁸ Abdul Rahman Suleman, dkk. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. (Jakarta : Yayasan Kita Menulis. 2020), 35

sinergi dengan usaha yang sudah ada di masyarakat.

- c. BUMDes sebagai Social Enterprise menyelesaikan masalah sosial dengan menciptakan nilai tambah untuk masyarakat dengan strategi tiga pilar: penciptaan nilai tambah (Creating Value), pengelolaan aset dan potensi (Managing Value), serta pendistribusian manfaat bagi masyarakat (Distributing Value).³⁰

Dilihat dari filosofi yang telah disebutkan, BUMDes adalah entitas ekonomi desa yang beroperasi secara otonom, dengan pengurus yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pengembangan

c. Jenis Usaha BUMDes

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas ekonomi desa melalui pengambilan keputusan independen tentang pengembangan usaha yang berpotensi dan berpeluang besar. Adapun berikut merupakan Jenis usaha yang dapat dijalankan BUMDes antara lain³¹ :

1) Usaha Sosial (*Social Business*)

Usaha pelayanan publik memiliki karakteristik khusus, yaitu memprioritaskan kepentingan publik daripada keuntungan finansial, sehingga menghasilkan margin keuntungan yang relatif rendah. Contoh yaitu berasal dari sumber daya lokal, seperti bahan pangan, persediaan air minum dan listrik

2) Usaha Sewa (*Renting*)

Usaha ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan kemudahan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui penyediaan layanan penyewaan. Contohnya untuk sewa hajatan atau pesta, penyewaan alat bangunan, penyewaan mesin dan lain sebagainya.

³⁰ Abdul Rahman Suleman, dkk. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. (Jakarta : Yayasan Kita Menulis. 2020). 35

³¹ Abdul Rahman Suleman, dkk. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. (Jakarta : Yayasan Kita Menulis. 2020). 40

3) Usaha Dagang

BUMDes membantu masyarakat dengan memasarkan produk dan menyediakan barang sulit ditemukan. Dalam hal ini BUMDes sebagai fasilitator ekonomi lokal dengan memasarkan produk masyarakat dan menyediakan akses ke barang-barang yang langka atau sulit dijangkau.

4) Usaha Perantara (*Brokering*)

BUMDes bertindak sebagai agen pemasaran dan distribusi, menghubungkan produsen lokal dengan pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Bidang lain seperti kerajinan, peternakan, perkebunan

5) Usaha Bersama (*Holding*)

BUMDes dapat berperan sebagai pengelola dan pengembang destinasi wisata desa, mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

6) Kontraktor (*Contracting*)

BUMDes berperan memanfaatkan peluang bisnis sebagai pemasok bahan dan material untuk proyek desa, mendukung kebijakan pemerintah tentang pengutamaan kontraktor lokal

7) Keuangan (*Banking*)

BUMDes sebagai lembaga keuangan desa, menyediakan fasilitas permodalan usaha yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat, mendorong produktivitas ekonomi lokal. membantu warga dalam memperoleh modal untuk menjadikan masyarakat yang produktif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh George Terry dalam prinsip manajemen yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Prinsip Perencanaan (Principle of Planning), Prinsip Organisasi (Principle of Organization), Prinsip Pengarahan (Principle of Direction), dan Prinsip Pengendalian (Principle of Control). Sehingga dengan

adanya penerapan ini setiap tindakan dapat berjalan dengan flexible dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam penelitian juga menggunakan analisis SWOT. SWOT merupakan akronim dari *Strength*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats*. Matriks SWOT berisi data tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan organisasional yang merupakan hasil pengembangan analisis situasional. Hasil analisis SWOT ini nanti akan disajikan dalam format matriks 2x2 dan dalam bentuk deskriptif.³²

Adapun beberapa pengertian mengenai analisis SWOT menurut para ahli. Menurut Pearce dan Robinson, Analisis SWOT merupakan alat manajemen strategis yang sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*) dan eksternal peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) guna pengembangan strategi bisnis. Analisis ini berbasis pada prinsip pengoptimalan kekuatan dan peluang serta mitigasi kelemahan dan ancaman untuk mencapai strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan. Jika hal ini diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.³³

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi analisis SWOT antara lain sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strenghts*)

Kekuatan merupakan kapabilitas perusahaan yang merujuk pada sumber daya, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, memungkinkan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal. Kekuatan mencakup berbagai aspek seperti sumber daya keuangan, citra perusahaan, posisi kepemimpinan pasar, hubungan dengan pembeli dan pemasok serta faktor-faktor strategis lainnya.

³² T. Hani Handoko, dkk. *Manajemen Dalam Berbagai Perspektif*. (Jakarta: Erlangga, 2012), 297

³³ Pearce Robinson, *Manajemen Stratejik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, 229

Faktor-faktor kekuatan yang dimiliki perusahaan atau organisasi adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Kekuatan perusahaan merupakan kompetensi khusus yang menghasilkan keunggulan kompetitif, didukung oleh sumber daya, keterampilan dan produk unggulan yang memuaskan kebutuhan pasar.³⁴

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merujuk pada keterbatasan atau kekurangan sumber daya, kemampuan atau kapabilitas yang menghambat perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal. Dalam praktek keterbatasan dan kelemahan - kelemahan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh konsumen atau calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai.

Kekuatan dan kelemahan internal merupakan aspek intern organisasi yang mencakup efektivitas manajemen, strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, proses produksi, penelitian dan pengembangan serta fungsi-fungsi operasional lainnya.³⁵

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang merupakan kesempatan strategis yang muncul dari lingkungan eksternal perusahaan, mencakup kecenderungan pasar, perubahan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lain yang dapat dimanfaatkan. Peluang perusahaan muncul dari identifikasi segmen pasar terlewatkan, perubahan persaingan dan regulasi, perkembangan teknologi serta perbaikan hubungan dengan pembeli dan

³⁴ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategi*, 172

³⁵ Fred, R. David, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Salemba Empat, 2011),

pemasok, yang menciptakan kesempatan strategis untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan keunggulan kompetitif.

4. Ancaman (*Threats*)

Ancaman adalah situasi tidak menguntungkan yang menghambat perusahaan. Ancaman merupakan kondisi eksternal yang tidak mendukung dan menghalangi perusahaan mencapai tujuan atau mempertahankan posisi saat ini. Faktor-faktor yang mengancam keberhasilan perusahaan mencakup: masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang stagnan, peningkatan kekuatan tawar-menawar pembeli/pemasok, perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan regulasi yang mempengaruhi operasional perusahaan.³⁶

Proses perencanaan strategis harus dimulai dengan analisis SWOT yang komprehensif untuk memahami kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Analisis strategis harus meliputi identifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta analisis peluang dan ancaman eksternal untuk menginformasikan pengambilan keputusan strategis. Kemampuan strategis perusahaan bergantung pada kemampuan penentu strategi dalam memanfaatkan kekuatan, mengoptimalkan peluang, mengatasi kelemahan dan mengurangi dampak ancaman.³⁷

Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu:

1. Faktor eksternal mempengaruhi *opportunities* and *threats* (O dan T)

Faktor-faktor eksternal mencakup kondisi di luar perusahaan seperti lingkungan industri dan makro, yang terdiri dari ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan dan sosial budaya. faktor ini

³⁶ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 109.

³⁷ Pearce Robinson, *Manajemen Stratejik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, 231.

menyangkut dengan kondisi- kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan.

2. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya *strengths* and *weaknesses* (S dan W)

Faktor internal merupakan komponen kunci dalam analisis strategis perusahaan. Lingkungan internal perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap proses pengambilan keputusan. Faktor internal perusahaan terdiri dari berbagai manajemen fungsional seperti pemasaran, keuangan, operasi, SDM, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen serta budaya perusahaan.³⁸

Alternatif strategi harus berfokus pada penggunaan kekuatan, perbaikan kelemahan, pemanfaatan peluang dan pengurangan ancaman. sehingga Analisis SWOT menghasilkan empat strategi: SO (Kekuatan-Peluang), ST (Kekuatan-Ancaman), WO (Kelemahan-Peluang) dan WT (Kelemahan-Ancaman).³⁹

B. Penelitian Relevan

Untuk memperkaya atau memperluas wawasan dari hasil penelitian yang diajukan, maka dengan ini dimasukan beberapa penelitian yang relevan terkait dengan judul yang diajukan. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adinda Septya K. yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati). Hasil penelitian di BUMDes Kencana Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan BUMDes ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang menjadi sebuah tantangan dalam menjalankan berbagai unit usaha BUMDes Kencana Desa Pekalongan.

³⁸ Irham Fahmi, *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*, 260

³⁹ Mudraja Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif* (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005), 51

2. Hasil penelitian yang dilakukan Dimas Rizki Ramanda yang berjudul Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Warung Bumdes Sehati Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan). Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sehati ini dengan fokus penelitian di BUMDes, menunjukkan bahwa dengan adanya BUMDes mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan Masyarakat Desa Sehati.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ori Ade Kapanta yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Perekonomian Desa (*Studi Kasus Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes di desa Orong Bawa membawa dampak positif bagi masyarakat. Terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan juga pastinya meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dari ketiga penelitian tersebut, hal yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu akan mengungkapkan sebuah program masyarakat dalam hal ini BUMDes yang bukan hanya menjadi sarana fasilitas bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah berbagai program yang akan membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat.

C. Kerangka Berpikir

Strategi pemberdayaan perlu dilakukan di desa dalam hal ini program dari BUMDes dan pemerintah desa menjadi penggerak dalam upaya penerapan strategi pemberdayaan. Dalam upaya strategi pemberdayaan tentu ada beberapa faktor yang memengaruhi. Faktor sumber daya menjadi salah satu faktor yang penting dalam hal pemberdayaan. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selanjutnya faktor pendukung dan penghambat juga tidak kalah pentingnya dalam pemberdayaan. Dalam hal ini harus bisa memanfaatkan adanya faktor pendukung sekaligus mengatasi faktor penghambat.

Oleh karena itu kesuksesan terhadap program BUMDes menjadi tolok ukur terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Proses ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat kedepannya. Berdasarkan kerangka teori dan tujuan

penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

